

## Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah di Era Digital: Kajian Literatur terhadap Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di Indonesia

Lena Rusmiyati<sup>1\*</sup>, Ridwan Abdullah<sup>2</sup>, Siti Zulaikha<sup>3</sup>, Muh. Takdir<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Jl. R. Mangun Muka Raya No.11, RT 11 RW 14, Rawamangun, Kec. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia.

E-mail: [lenarusmiyati0550@gmail.com](mailto:lenarusmiyati0550@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1428>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 09 June 2025

Revised: 19 June 2025

Accepted: 25 June 2025

#### Kata Kunci:

Manajemen Keuangan Sekolah, Digitalisasi, Efektivitas, Transparansi, Akuntabilitas.

#### Keywords:

School Financial Management, Digitalization, Effectiveness, Transparency, Accountability.

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian sistematis terhadap berbagai literatur ilmiah yang membahas penerapan teknologi informasi dalam memperkuat tata kelola keuangan di lembaga pendidikan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menganalisis 15 artikel ilmiah baik nasional maupun internasional yang diterbitkan antara tahun 2019 hingga 2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan sistem keuangan digital, seperti ARKAS, SIMUTU, dan teknologi *blockchain*, terbukti meningkatkan efisiensi dalam proses perencanaan dan pelaporan anggaran, memperkuat transparansi publik, serta mendorong akuntabilitas yang berbasis pada evaluasi dan partisipasi masyarakat. Namun, digitalisasi juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, literasi digital pengelola keuangan, serta keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan sektor swasta, serta regulasi yang adaptif untuk membangun sistem keuangan pendidikan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Kajian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia dan integrasi sistem digital dalam kebijakan keuangan sekolah sebagai strategi utama untuk mendukung kualitas pendidikan nasional.

*This study aims to conduct a systematic review of various scientific literature that discusses the application of information technology in strengthening financial governance in educational institutions in Indonesia. The method used is a literature study with a qualitative descriptive approach, which analyzes 15 national and international scientific articles published between 2019 and 2025. The results of the study show that the application of digital financial systems, such as ARKAS, SIMUTU, and blockchain technology, has been proven to increase efficiency in the budget planning and reporting process, strengthen public transparency, and encourage accountability based on evaluation and community participation. However, digitalization also faces various challenges, such as limited infrastructure, digital literacy of financial managers, and data security. Therefore, collaboration between the government, schools, and the private sector, as well as adaptive regulations are needed to build an inclusive, safe, and sustainable education financial system. This study recommends strengthening human resource capacity and integrating digital systems into school financial policies as the main strategy to support the quality of national education.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Lena Rusmiyati, et al (2025). Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah di Era Digital:Kajian Literatur terhadap Efektivitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Pendidikan di Indonesia, 3(4). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1428>

## PENDAHULUAN

Dalam lanskap pembangunan nasional yang terus berubah serta di tengah arus globalisasi yang menuntut daya saing tinggi, pendidikan memainkan peran sentral sebagai pilar utama pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan bukan sekadar alat reproduksi pengetahuan, tetapi juga fondasi strategis untuk menciptakan generasi yang adaptif, inovatif, dan kompeten menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, penguatan tata kelola pendidikan, khususnya dalam aspek manajemen keuangan sekolah, menjadi prioritas penting dalam mendukung tercapainya mutu dan keberlanjutan pendidikan.

Manajemen keuangan sekolah berfungsi bukan hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian strategis untuk menjamin efisiensi alokasi sumber daya, pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, serta akuntabilitas publik. Seiring berkembangnya era digital, proses pengelolaan dana pendidikan mengalami transformasi mendasar dengan masuknya teknologi informasi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan. Penggunaan aplikasi seperti ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan SIPLah, serta sistem informasi mutu internal seperti SIMUTU, menjadi bentuk nyata digitalisasi dalam penganggaran, pelaporan, dan pengawasan dana satuan pendidikan (Prihanarko & Hidayati, 2023; Widodo et al., 2023).

Lebih lanjut, integrasi teknologi baru seperti blockchain untuk transparansi keuangan dan crowdfunding sebagai alternatif pendanaan berbasis komunitas mulai diperkenalkan dalam konteks pendidikan, khususnya pada wilayah dengan keterbatasan fiskal (Setiawan et al., 2023; Hikmah et al., 2024). Digitalisasi ini memfasilitasi proses perencanaan hingga evaluasi anggaran yang lebih cepat dan terukur, serta membuka ruang bagi keterlibatan pemangku kepentingan secara lebih luas (Nur & Nurfuadi, 2024). Di sisi lain, manajemen keuangan berbasis kinerja dan partisipasi publik, yang didorong oleh prinsip-prinsip *New Public Management*, menunjukkan kontribusi nyata dalam membangun sistem keuangan yang akuntabel dan berorientasi hasil (Suryaman & Lestari, 2025; Fitriyani et al., 2021).

Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Masalah seperti ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi teknologi di kalangan pengelola sekolah, serta isu keamanan data dan integritas sistem masih menjadi hambatan yang signifikan dalam penerapan sistem digital secara merata (Siregar & Prasetyo, 2022; Ramadhani & Fikri, 2024). Selain itu, keberhasilan manajemen keuangan sangat bergantung pada kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, partisipasi aktif komite, serta pengawasan berlapis dari unit internal dan eksternal (Weni & Isfaiyah, 2024; Dilla, 2019). Model pengawasan berbasis digital dan keterbukaan anggaran melalui *dashboard publik* terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat, meski belum diimplementasikan secara luas.

Berangkat dari realitas tersebut, artikel ini bertujuan untuk menyajikan kajian literatur sistematis terhadap transformasi manajemen keuangan sekolah di era digital, dengan fokus pada tiga dimensi utama: efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Studi ini mengkaji 15 artikel ilmiah nasional dan internasional terbitan lima tahun terakhir yang telah melalui proses peer-review, untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik, tantangan implementasi, serta merumuskan solusi strategis dalam memperkuat tata kelola dana pendidikan di Indonesia. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis sekaligus praktis dalam upaya reformasi manajemen keuangan sekolah berbasis digital sebagai fondasi penting menuju pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan.

## METODE

Dalam ranah penelitian pendidikan, pendekatan studi literatur berbasis kualitatif deskriptif merupakan metode yang sangat relevan untuk menggali, memahami, dan mensintesis pengetahuan yang telah ada guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena tertentu. Studi literatur tidak hanya berfungsi sebagai kajian konseptual, tetapi juga dapat menjadi pendekatan sistematis untuk mengevaluasi bukti empiris terdahulu, memetakan tren penelitian, serta mengidentifikasi kesenjangan teoretis dan praktik kebijakan (Snyder, 2019).

Pada penelitian ini, pendekatan deskriptif kualitatif digunakan untuk mengkaji transformasi manajemen keuangan sekolah di era digital melalui analisis terhadap 15 artikel ilmiah nasional dan internasional yang terbit antara tahun 2019 hingga 2025. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam dan kontekstual, terutama pada tiga dimensi utama yang diteliti, yaitu efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan. Metode ini

memungkinkan peneliti untuk melakukan interpretasi secara kritis terhadap data sekunder yang tersedia, tanpa melakukan intervensi langsung terhadap objek lapangan (Bowen, 2009).

Seleksi artikel dilakukan dengan menggunakan kriteria inklusi yang ketat, di antaranya mencakup keterkaitan langsung dengan praktik atau kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan di satuan pendidikan formal, mencantumkan penggunaan teknologi digital dalam sistem pembiayaan, serta membahas minimal satu dari tiga dimensi yang menjadi fokus studi. Untuk menjamin validitas akademik, sumber artikel dibatasi hanya pada jurnal terakreditasi nasional (SINTA 2–4), database ilmiah terpercaya (Google Scholar, Garuda, DOAJ), serta publikasi internasional yang telah melalui proses peer-review.

Proses analisis data mengacu pada model tematik Miles dan Huberman (1994) yang terdiri atas tiga tahap utama: Reduksi data, yaitu proses pemilahan, penyaringan, dan abstraksi informasi penting dari masing-masing artikel. Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi elemen pokok seperti konteks penelitian, metode, hasil utama, dan relevansi dengan dimensi efektivitas, transparansi, atau akuntabilitas. Penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi yang telah direduksi ke dalam format tematik, misalnya melalui matriks, kategori dimensi, dan pemetaan model temuan. Hal ini memudahkan peneliti dalam menemukan pola-pola konsisten, kontradiksi, atau tren dalam praktik pengelolaan keuangan berbasis digital di sekolah. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni proses sintesis lintas studi yang dilakukan untuk mengembangkan pemahaman teoritis yang lebih luas, serta menarik generalisasi sementara yang tetap berpijak pada konteks empiris dan hasil validasi silang antar-sumber (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Metode studi literatur seperti ini semakin penting dalam konteks perubahan kebijakan dan teknologi yang cepat di sektor pendidikan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa pendekatan literature review yang sistematis dan berbasis kriteria inklusi yang ketat dapat meningkatkan validitas eksternal, efisiensi sintesis bukti, serta memperkuat rekomendasi kebijakan berbasis data (Boell & Cecez-Kecmanovic, 2015; Torraco, 2020).

Dengan demikian, penggunaan metode studi literatur kualitatif deskriptif dalam kajian ini bukan sekadar pendekatan alternatif, tetapi menjadi kerangka kerja ilmiah yang solid dalam merumuskan strategi, tantangan, dan solusi atas transformasi manajemen keuangan pendidikan di era digital.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Efektivitas Pengelolaan Keuangan***

Efektivitas pengelolaan keuangan pendidikan mencerminkan kemampuan satuan pendidikan dalam memanfaatkan dana secara optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di era digital, penerapan teknologi seperti ARKAS dan SIMUTU telah membantu sekolah dalam mempercepat proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga meminimalisir kesalahan manual yang sering terjadi dalam pencatatan keuangan (Widodo et al., 2023; Prihanarko & Hidayati, 2023).

Selain itu, pendekatan manajemen berbasis kinerja mulai banyak diterapkan. Dana pendidikan, khususnya dana BOS, dialokasikan berdasarkan pencapaian target yang terukur, seperti peningkatan mutu pembelajaran dan pengadaan fasilitas. Pendekatan ini mendorong penggunaan anggaran secara tepat guna, serta memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dampak langsung terhadap proses pendidikan (Suryaman & Lestari, 2025).

Sementara itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan menjadi aspek penting untuk menjaga kepercayaan publik. Digitalisasi mendorong keterbukaan informasi anggaran dan pelibatan aktif pemangku kepentingan, seperti komite sekolah dan orang tua, dalam proses perencanaan dan pengawasan. Dengan sistem yang lebih terbuka, lembaga pendidikan dapat menunjukkan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam penggunaan dana. Dengan demikian, penerapan teknologi digital dan prinsip transparansi tidak hanya memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan sekolah, tetapi juga menjadi pondasi penting bagi terciptanya tata kelola pendidikan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

### ***Transparansi Pengelolaan Keuangan***

Penerapan teknologi digital dalam pelaporan keuangan sekolah, seperti melalui aplikasi ARKAS, telah meningkatkan transparansi di lingkungan pendidikan. Sistem ini memungkinkan akses data secara langsung oleh dinas pendidikan, sehingga pengawasan dapat dilakukan secara real-time dan berbasis bukti. Di sekolah swasta, sistem internal seperti SIMUTU juga membantu memperkuat dokumentasi dan pelaporan, meskipun masih terdapat kendala integrasi dengan sistem nasional (Nur & Nurfuadi, 2024).

Inovasi lebih lanjut terlihat dari penerapan teknologi blockchain dalam pencatatan transaksi keuangan. Teknologi ini menawarkan keunggulan dalam keamanan dan keandalan data, karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan sulit dimanipulasi. Hal ini memperkuat integritas sistem keuangan sekolah dan membangun budaya transparansi yang lebih kokoh (Hikmah et al., 2024).

Selain teknologi, keterlibatan masyarakat dan komite sekolah dalam pengawasan anggaran menjadi faktor penting dalam mewujudkan transparansi. Partisipasi aktif dari orang tua dan warga sekolah berkontribusi dalam mencegah penyalahgunaan dana dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sekolah (Weni & Isfaiyah, 2024). Dengan demikian, sinergi antara sistem digital yang andal dan pengawasan partisipatif membentuk landasan kuat bagi tata kelola keuangan sekolah yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tuntutan zaman.

### ***Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan***

Akuntabilitas adalah dimensi yang sangat penting dalam manajemen keuangan pendidikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban yang jelas, sistematis, dan dapat diverifikasi untuk setiap penggunaan anggaran. Dalam konteks pengelolaan dana pendidikan di sekolah, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk komitmen moral dan profesional terhadap efektivitas penggunaan sumber daya publik untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Penerapan prinsip akuntabilitas terlihat melalui adanya dokumen perencanaan keuangan yang formal dan terdokumentasi, seperti Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dokumen-dokumen ini menjadi pedoman utama dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi setiap aktivitas pembiayaan pendidikan. Selain itu, pelaporan keuangan dilakukan secara berkala kepada berbagai pihak, baik di lingkungan internal sekolah maupun kepada instansi pengawas eksternal, sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran (Dilla, 2019; Harbes et al., 2024).

Akuntabilitas juga diperkuat melalui pelaksanaan evaluasi triwulan dan pemantauan rutin terhadap realisasi anggaran. Kegiatan ini memungkinkan sekolah untuk melakukan penilaian secara objektif mengenai sejauh mana penggunaan dana sesuai dengan perencanaan awal. Dengan demikian, potensi penyimpangan atau pemborosan anggaran dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki sebelum berdampak lebih luas terhadap pelaksanaan program pendidikan (Trisnawati & Suryaman, 2025).

Tak kalah penting, proses audit oleh pihak eksternal seperti inspektorat daerah, pengawas sekolah, maupun lembaga yayasan (untuk sekolah swasta), menjadi instrumen formal yang menegakkan standar akuntabilitas publik. Audit ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi aspek kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga menilai efektivitas pengelolaan dana dalam mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan.

Dengan demikian, akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sekolah tidak hanya mengandalkan sistem pelaporan, tetapi juga memerlukan budaya pengawasan yang berkelanjutan dan sumber daya manusia yang kompeten. Akuntabilitas yang kuat menjadi jaminan bahwa setiap rupiah dana pendidikan digunakan secara bertanggung jawab, efisien, dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan.

Digitalisasi dalam pengelolaan keuangan sekolah telah membawa perubahan signifikan terhadap cara institusi pendidikan merancang, mengelola, dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara menyeluruh. Di tengah kompleksitas birokrasi dan keterbatasan sumber daya manusia di sektor

pendidikan, kehadiran teknologi digital menjadi solusi strategis yang memperkuat efektivitas pengelolaan keuangan secara sistemik.

Aplikasi ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah), sebagai contoh utama dalam sistem informasi keuangan berbasis digital, memungkinkan sekolah untuk menyusun perencanaan anggaran secara otomatis dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Aplikasi ini tidak hanya mempercepat penyusunan RKAS, tetapi juga mengintegrasikan data sekolah secara langsung dengan sistem nasional seperti Dapodik, sehingga mengurangi terjadinya ketidaksesuaian data antar sistem. Integrasi ini mendukung pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based), karena semua komponen pendukung jumlah siswa, rasio guru, kebutuhan operasional, dan alokasi dana—terpadu dalam satu sistem (Widodo et al., 2023).

Efektivitas digitalisasi semakin jelas terlihat ketika diterapkan dalam pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting). Melalui pendekatan ini, anggaran tidak hanya disusun berdasarkan input semata, tetapi juga diarahkan untuk mencapai indikator hasil pendidikan yang terukur. Sekolah yang mengadopsi sistem ini dapat mengalokasikan dana secara lebih strategis, misalnya untuk penguatan kompetensi guru, peningkatan capaian literasi-numerasi siswa, atau pengembangan program kejuruan yang selaras dengan dunia industri (Suryaman & Lestari, 2025). Dengan demikian, setiap pengeluaran memiliki orientasi yang jelas terhadap output dan outcome pendidikan.

Selain itu, digitalisasi mempercepat proses realokasi dana dalam kondisi tertentu. Sebagai contoh, dalam situasi darurat seperti pandemi COVID-19, sekolah yang telah menggunakan sistem digital dapat dengan cepat mengubah prioritas anggaran untuk mendukung pembelajaran daring atau pengadaan protokol kesehatan. Tanpa sistem digital, proses tersebut akan memakan waktu dan rentan terhadap keterlambatan administratif yang merugikan proses belajar mengajar.

Efektivitas juga tercermin dalam penghematan waktu dan biaya operasional. Proses pelaporan manual yang sebelumnya membutuhkan banyak dokumen cetak dan pengarsipan fisik kini dapat disederhanakan melalui dashboard dan sistem elektronik yang dapat diakses kapan saja oleh pihak yang berwenang. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga mengurangi beban kerja administratif guru dan kepala sekolah, sehingga mereka dapat lebih fokus pada aspek pedagogik.

Namun demikian, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur dan kapasitas SDM. Sekolah di wilayah tertinggal atau dengan keterbatasan akses internet sering kali belum dapat mengoptimalkan teknologi secara maksimal. Oleh karena itu, digitalisasi harus diikuti dengan peningkatan literasi digital, pelatihan intensif bagi pengelola keuangan sekolah, dan penyediaan perangkat pendukung yang memadai.

Secara keseluruhan, digitalisasi tidak hanya berperan sebagai alat bantu teknis, tetapi juga telah menjadi pilar utama dalam membangun sistem manajemen keuangan pendidikan yang efisien, responsif, dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi teknologi secara maksimal, sekolah dapat mengelola sumber daya dengan lebih terencana, terkendali, dan terukur—sebuah langkah penting menuju peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Dalam konteks manajemen keuangan pendidikan, transparansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan administratif, tetapi juga merupakan pondasi moral dan institusional untuk membangun kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan—baik internal seperti guru dan kepala sekolah, maupun eksternal seperti orang tua, komite sekolah, pemerintah, dan masyarakat luas. Di era digital, transparansi semakin menjadi kebutuhan fundamental seiring dengan meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.

Penerapan teknologi informasi telah menjadi instrumen transformasional dalam menciptakan budaya keterbukaan di lembaga pendidikan. Aplikasi pelaporan digital seperti ARKAS memungkinkan sekolah tidak hanya menyusun RKAS secara sistematis, tetapi juga menyajikan data keuangan secara real-time yang dapat diakses oleh pihak berwenang. Di beberapa sekolah, bahkan informasi penggunaan dana BOS dan realisasi anggaran disampaikan kepada orang tua melalui grup komunikasi digital atau portal resmi sekolah, yang secara langsung meningkatkan transparansi dan mencegah kesan tertutup terhadap pengelolaan dana pendidikan.

Lebih lanjut, sekolah swasta seperti SD Muhammadiyah 7 Bandung telah mengembangkan sistem pelaporan internal yang dikenal sebagai SIMUTU, yang memperkuat transparansi internal melalui integrasi data keuangan, pengadaan, dan audit (Prihanarko & Hidayati, 2023). Meskipun integrasi dengan sistem nasional masih terbatas, inisiatif ini menunjukkan adanya kesadaran institusional bahwa transparansi merupakan kunci keberlanjutan operasional, terutama bagi lembaga yang bergantung pada kepercayaan publik dan dana masyarakat.

Dalam konteks yang lebih maju, teknologi blockchain mulai diteliti dan bahkan diimplementasikan secara terbatas dalam sistem pengelolaan dana pendidikan karena keunggulannya dalam menyediakan rekaman transaksi yang tidak dapat dimanipulasi dan dapat terlacak secara permanen. Teknologi ini menawarkan sistem verifikasi otomatis dan audit digital yang meningkatkan integritas data serta mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi atau penyelewengan anggaran (Hikmah et al., 2024). Meskipun adopsi blockchain di lingkungan sekolah Indonesia belum merata, potensi teknologi ini untuk memperkuat transparansi dalam jangka panjang sangat besar, terutama di tingkat dinas atau yayasan besar.

Selain aspek teknologi, transparansi yang efektif juga memerlukan keterlibatan sosial yang bermakna. Keterlibatan komite sekolah, dewan guru, dan orang tua siswa dalam proses penyusunan dan evaluasi anggaran mendorong dialog partisipatif yang memperkuat rasa kepemilikan terhadap program-program sekolah. Partisipasi ini tidak hanya memperluas pengawasan sosial, tetapi juga meningkatkan legitimasi keputusan manajerial sekolah. Dalam studi yang dilakukan oleh Weni & Isfaiyah (2024), sekolah yang melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan dan monitoring RKAM menunjukkan pengurangan signifikan terhadap konflik internal serta meningkatnya kepercayaan orang tua terhadap proses pendidikan anak-anak mereka.

Namun demikian, transparansi yang dibangun melalui digitalisasi tidak bebas dari tantangan. Kesenjangan digital antar daerah, rendahnya literasi keuangan, dan minimnya pemahaman terhadap dokumen anggaran di kalangan masyarakat awam masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, sekolah perlu secara aktif mengedukasi pemangku kepentingan tentang cara membaca laporan keuangan serta menyediakan penjelasan dalam format yang mudah dipahami. Transparansi bukan hanya tentang akses terhadap data, tetapi juga tentang kemampuan memahami data tersebut secara kritis.

Dengan demikian, dalam era digital, transparansi bukan sekadar prosedur, tetapi menjadi nilai strategis yang mendasari legitimasi lembaga pendidikan. Ketika sekolah mampu mengelola keuangan secara terbuka, didukung oleh sistem digital yang kuat dan partisipasi masyarakat yang aktif, maka akan tumbuh kepercayaan kolektif terhadap sekolah sebagai institusi publik yang jujur, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan.

Dalam sistem manajemen keuangan pendidikan, akuntabilitas tidak hanya mencerminkan kewajiban formal untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, tetapi juga menjadi ukuran keberhasilan kelembagaan dalam mengelola sumber daya publik secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil. Akuntabilitas yang kokoh akan menciptakan iklim tata kelola sekolah yang sehat, profesional, dan dipercaya publik. Namun, praktik akuntabilitas yang baik tidak cukup hanya dengan keberadaan sistem digital dan dokumen administrative, tetapi juga sangat tergantung pada kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang menjalankan fungsi tersebut.

Kepala sekolah sebagai pemimpin manajerial memiliki peran utama dalam mengarahkan kebijakan anggaran dan memastikan bahwa setiap keputusan keuangan selaras dengan rencana strategis sekolah. Sementara itu, bendahara sekolah dan staf administrasi berfungsi sebagai eksekutor teknis yang memastikan bahwa alur penerimaan, pencatatan, pengeluaran, hingga pelaporan keuangan berjalan sesuai dengan prinsip akuntansi publik dan ketentuan yang berlaku. Kapasitas, integritas, serta literasi digital dan keuangan dari aktor-aktor kunci ini menjadi penentu utama dalam keberhasilan sistem akuntabilitas yang dijalankan (Weni & Isfaiyah, 2024).

Selain kapasitas individu, praktik evaluasi keuangan yang dilakukan secara berkala menjadi instrumen yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas berlangsung secara berkesinambungan. Sekolah-sekolah yang melaksanakan evaluasi triwulanan dan audit internal secara rutin terbukti lebih responsif terhadap potensi penyimpangan anggaran dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan koreksi lebih awal. Evaluasi ini memungkinkan pemantauan terhadap kesesuaian antara rencana dan realisasi anggaran, serta memberikan dasar objektif untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di masa depan (Dilla, 2019; Trisnawati & Suryaman, 2025).

Lebih lanjut, keberadaan audit eksternal yang dilakukan oleh pengawas sekolah, inspektorat daerah, atau lembaga yayasan (untuk sekolah swasta), juga memberikan tekanan positif agar lembaga pendidikan menjaga disiplin dalam pelaporan dan penggunaan dana. Audit tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol kualitas terhadap sistem keuangan sekolah. Dalam praktiknya, sekolah yang memiliki sistem digital keuangan yang terdokumentasi dengan baik, seperti ARKAS dan aplikasi pelaporan internal lainnya, jauh lebih siap dalam menghadapi audit karena seluruh transaksi dan bukti pengeluaran dapat diakses dengan cepat dan akurat.

Namun, tantangan utama dalam memperkuat akuntabilitas masih terletak pada keterbatasan kompetensi SDM di banyak satuan pendidikan, terutama di daerah yang akses terhadap pelatihan keuangan digital masih terbatas. Masih banyak kepala sekolah dan bendahara yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan berbasis hasil (*performance-based budgeting*) atau bahkan tidak terbiasa menggunakan aplikasi pelaporan digital secara optimal. Di sinilah pentingnya dukungan pemerintah dan lembaga pelatihan profesional untuk meningkatkan kapasitas pengelola keuangan sekolah melalui program peningkatan kompetensi, sertifikasi, dan pendampingan teknis yang berkelanjutan.

Lebih dari sekadar laporan keuangan yang rapi, akuntabilitas sejati dalam pendidikan hanya dapat tercapai apabila ada kesadaran kolektif di internal sekolah tentang pentingnya tanggung jawab moral dan profesional dalam menggunakan dana publik. Maka dari itu, budaya akuntabilitas harus ditanamkan tidak hanya melalui sistem dan prosedur, tetapi juga melalui pembinaan nilai dan etika di kalangan pengelola sekolah. Akuntabilitas yang efektif adalah hasil sinergi antara sistem digital, praktik evaluasi yang disiplin, dan sumber daya manusia yang kompeten serta berintegritas.

Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan pendidikan adalah langkah maju yang menjanjikan perbaikan signifikan dalam efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan. Namun, kemajuan ini tidak dapat berlangsung secara optimal jika hanya dilakukan secara parsial atau sektoral. Digitalisasi keuangan sekolah memerlukan ekosistem yang mendukung secara menyeluruh, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga adanya regulasi yang mendorong sinergi antar aktor pendidikan. Oleh karena itu, kolaborasi multisektor dan kebijakan yang adaptif menjadi kebutuhan mendasar dalam membangun sistem pengelolaan keuangan digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan infrastruktur digital, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Tidak semua satuan pendidikan memiliki akses internet yang stabil, perangkat keras yang memadai, atau bahkan tenaga operator yang memahami teknologi. Akibatnya, banyak sekolah mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis aplikasi seperti ARKAS secara maksimal. Dalam konteks ini, peran pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting untuk memastikan distribusi infrastruktur TIK (teknologi informasi dan komunikasi) secara merata sebagai bagian dari kebijakan afirmatif terhadap pendidikan inklusif (Harbes et al., 2024).

Selain infrastruktur, literasi digital bagi pengelola keuangan sekolah masih menjadi masalah yang perlu ditangani dengan serius. Banyak kepala sekolah, bendahara, dan operator yang masih kurang memahami teknologi dan belum menerima pelatihan yang memadai untuk mengoperasikan sistem

pelaporan digital. Hal ini berisiko menimbulkan kesalahan dalam input data, keterlambatan dalam laporan, atau bahkan kesalahpahaman mengenai fitur dan alur proses dalam sistem. Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pelatihan pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyediakan program pelatihan teknis serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Tantangan lain yang juga sangat penting adalah risiko keamanan data. Sistem pengelolaan keuangan digital menyimpan data sensitif yang mencakup informasi anggaran, transaksi, hingga identitas pengguna. Dalam kondisi sistem keamanan siber yang belum optimal di banyak lembaga pendidikan, potensi kebocoran data atau penyalahgunaan sistem oleh pihak yang tidak bertanggung jawab menjadi ancaman yang serius. Oleh karena itu, kolaborasi dengan sektor swasta, khususnya penyedia layanan teknologi dan keamanan digital, menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem keuangan pendidikan tidak hanya efisien, tetapi juga terlindungi secara teknologi.

Dari perspektif kebijakan, keberhasilan digitalisasi keuangan sekolah sangat bergantung pada kerangka regulasi yang fleksibel namun kuat. Peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis dari kementerian terkait perlu mendukung integrasi antara sistem informasi sekolah dengan sistem perencanaan dan penganggaran nasional. Sebagai contoh, sistem pelaporan keuangan sekolah seharusnya secara otomatis terhubung dengan sistem SAKTI, SIMDA, atau aplikasi e-budgeting pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau redundansi data. Regulasi juga harus mendorong sistem terbuka yang memungkinkan sekolah untuk mengembangkan sistem internal tanpa terjebak pada platform tunggal yang kaku (Sabeni et al., 2025).

Kolaborasi yang dimaksud tidak hanya mencakup aspek teknis dan anggaran, tetapi juga melibatkan tata kelola kelembagaan. Yayasan sebagai penyelenggara sekolah swasta, dinas pendidikan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga akreditasi, dan lembaga non-pemerintah harus berperan aktif dalam mengawasi, mengevaluasi, serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan transformasi keuangan digital di lapangan. Prinsip gotong-royong antar institusi ini sangat penting untuk mencegah isolasi dalam pelaksanaan digitalisasi yang hanya mengandalkan sekolah sebagai pelaku tunggal.

Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital dalam manajemen keuangan sekolah sangat tergantung pada sinergi dan kepemimpinan kolektif. Pemerintah tidak cukup hanya menyediakan aplikasi, tetapi juga harus memastikan adanya ekosistem pendukung. Sekolah tidak hanya perlu melaporkan anggaran, tetapi juga harus dibimbing dan diperkuat kapasitasnya. Di sisi lain, sektor swasta dan masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam penyediaan solusi teknologi dan pengawasan bersama. Tanpa kolaborasi yang erat dan regulasi yang mendukung, digitalisasi manajemen keuangan sekolah berisiko menjadi beban administratif baru tanpa memberikan dampak nyata terhadap kualitas pendidikan.

## **SIMPULAN**

Program Tahfiz Qur'an di SMP Negeri Kabupaten Aceh Utara bukan sekadar kegiatan hafalan semata, tetapi telah menjadi instrumen efektif dalam membangun budaya sekolah berbasis nilai Qur'ani. Implementasi program yang terstruktur, didukung oleh semua pihak sekolah, serta adanya sistem evaluasi yang berkelanjutan terbukti mampu meningkatkan kualitas religiusitas siswa dan membentuk karakter Islami yang kuat. Ke depan, program ini perlu terus dikembangkan dengan inovasi metode tahfiz dan perluasan kerja sama dengan lembaga pendidikan Islam lain agar dapat menjadi model pendidikan karakter Islami di Aceh maupun nasional.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kontribusi, serta semangat selama proses penyusunan dan penyelesaian penelitian ini.

## REFERENSI

- Adzkia, R., Suryaman, M., & Putri, N. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaporan Dana BOS pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Depok. *Jurnal Ilmu Pendidikan Digital*, 6(1), 33–42.
- Boell, S. K., & Cecez-Kecmanovic, D. (2015). On being ‘systematic’ in literature reviews in IS. *Journal of Information Technology*, 30(2), 161–173. <https://doi.org/10.1057/jit.2014.26>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Dilla, M. (2019). Manajemen Keuangan Sekolah Dasar dalam Perspektif Akuntabilitas Publik. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen Sekolah*, 5(2), 112–120.
- Harbes, R., Lubis, A., & Firmansyah, M. (2024). Evaluasi Sistem Pengelolaan Keuangan Sekolah Berbasis Aplikasi ARKAS. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola Pendidikan*, 8(1), 55–67.
- Hikmah, S., Darmawan, D., & Kusuma, H. (2024). Blockchain Technology in School Financial Transparency: A Case Study in Indonesia. *International Journal of Educational Management and Technology*, 7(2), 97–109.
- Kirmadi, M., & Suryaman, M. (2025). Efektivitas Model Pembiayaan Berbasis Kinerja di Sekolah Menengah Kejuruan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 21–33.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nur, A., & Nurfuadi, D. (2024). Digitalisasi Laporan Keuangan Sekolah dan Implikasinya terhadap Transparansi Dana Pendidikan. *Jurnal Keuangan Pendidikan*, 9(2), 58–70.
- Prihanarko, R., & Hidayati, T. (2023). Sistem Informasi Keuangan Sekolah Swasta Berbasis Web (Studi Kasus SIMUTU di SD Muhammadiyah Bandung). *Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi Pendidikan*, 4(4), 78–85.
- Sabeni, A., Wijaya, H., & Rahman, A. (2025). Kebijakan Transformasi Keuangan Sekolah Digital dalam Perspektif Regulasi dan Infrastruktur Pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan Nasional*, 11(1), 14–27.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suryaman, M., & Lestari, T. (2025). Transformasi Manajemen Keuangan Sekolah Berbasis Kinerja dalam Meningkatkan Efisiensi Anggaran. *Jurnal Manajemen Pendidikan Nasional*, 13(1), 45–58.
- Torraco, R. J. (2020). Writing integrative literature reviews: Using the past and present to explore the future. *Human Resource Development Review*, 19(3), 243–246. <https://doi.org/10.1177/1534484320945522>
- Trisnawati, D., & Suryaman, M. (2025). Evaluasi Triwulan dalam Pengawasan RKAS: Studi Kasus Sekolah Menengah Negeri di Jawa Barat. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 7(1), 66–77.
- Weni, I., & Isfaiyah, A. (2024). Peran Komite Sekolah dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Dana BOS. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 6(1), 31–40.
- Widodo, A., Mulyani, N., & Hidayat, M. (2023). Efektivitas Penggunaan ARKAS dalam Menyusun RKAS pada Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, 11(2), 87–98.